

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bahasa Inggris, kata "policy" dapat diterjemahkan menjadi "kebijakan", yang berarti sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh pemerintah dan partai politik. Selain itu, kebijakan juga dapat berarti pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Ini menunjukkan bahwa kebijakan mencakup rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis yang dibuat oleh berbagai organisasi, termasuk pemerintah dan partai politik. Hecllo mengartikan kebijakan secara luas sebagai rangkaian tindakan atau non-tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah, melampaui tindakan atau keputusan khusus. Definisi ini dikenal sebagai decision making, yang mencakup pilihan pemerintah untuk menangani masalah publik melalui tindakan atau ketidak-tindakan. Kebijakan sebaiknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, daripada sekadar keputusan tunggal. Bukan hanya keputusan untuk bertindak, kebijakan menunjukkan arah atau pola kegiatan. Definisi lainnya menyatakan bahwa kebijakan adalah intervensi negara terhadap rakyatnya untuk mengatasi masalah publik, yang sering menyebabkan perselisihan antara pihak yang setuju dan tidak setuju dengan hasil kebijakan pemerintah (Nurholis et al., 2022).

Kata "kebijakan" berasal dari kata bahasa Inggris "policy", yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum dan administrasi pemerintah. Kebijakan lebih fokus pada tindakan atau produk yang ditetapkan secara subjektif. Kebijakan dapat didefinisikan secara operatif sebagai rangkaian aturan yang berfungsi sebagai pegangan, pegangan, atau bimbingan untuk mencapai kesepakatan tentang tujuan, cara, dan sarana operasi dan usaha kelompok. Ini memungkinkan dinamisasi gerak tindak yang terintegrasi, sehaluan, dan seirama untuk mencapai tujuan kolektif. Kebijakan juga mengacu pada kebijakan pemerintah atau instrumen pemerintah, yang mencakup pengelolaan sumber daya publik dan aparatur negara. Pada dasarnya, kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang mengatur pengelolaan dan pembagian sumber daya alam,

finansial, dan manusia untuk kepentingan umum. Kebijakan adalah hasil dari kerja sama, kompromi, kemitraan, atau bahkan kompetisi antara berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk struktur politik negara. Kebijakan biasanya didefinisikan sebagai kumpulan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyelesaikan masalah. Ini mencakup tujuan, rencana, keputusan, solusi, kegiatan, dan program yang akan dilaksanakan (Prabawati, Rahayu, 2017).

Pertanian organik sebagai bentuk pertanian berkelanjutan memerlukan perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani, serta penerapan teknologi yang sesuai. Petani tidak hanya diharuskan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka, tetapi juga harus membuat keputusan untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi tersebut, sambil menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan pertanian mereka (Gunawan et al., 2019). Sebagian besar orang Indonesia bekerja di sektor pertanian karena Indonesia adalah negara agraris. Hingga saat ini, sistem pertanian Indonesia masih klasik. Menurut Gliesman (2007), beberapa dampak negatif dari penerapan sistem pertanian konvensional termasuk kerusakan ekosistem sekitar, penurunan kesuburan dan kelembaban tanah, dan masalah serius dengan kesehatan konsumen akibat penggunaan pestisida (Lumbanraja Parlindungan, 2018).

Praktik pertanian berkelanjutan mencakup penggunaan nutrisi organik dan biologis, rotasi tanaman, pengelolaan hama terpadu, dan peningkatan keberagaman biologis. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang menggunakan daur ulang biologis untuk meningkatkan kesuburan dan struktur tanah dengan memasukkan semua bahan organik yang masuk ke dalam tanah, baik dari limbah tanaman maupun ternak. Tujuan dari pertanian organik adalah untuk memberi tanaman makanan tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Kebijakan pertanian yang lebih ramah lingkungan telah dimulai oleh pemerintah. Sistem pertanian organik dianggap dapat menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahun 2001, pertanian organik mulai berkembang di Indonesia. Sosialisasi adalah langkah pertama menuju pengembangan pertanian organik. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan dan bantuan teknis. Pada tahun 2004, bantuan teknis digabungkan dengan proses sertifikasi organik. Semua infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertanian organik, baik kelembagaan maupun fisik, diharapkan selesai pada tahun 2005. Dari tahun 2006 hingga 2010, industrialisasi dan perdagangan akan terus berkembang. Pengembangan ini diharapkan

akan memungkinkan Indonesia menjadi produsen dan eksportir makanan organik (Kelurahan Dadaprejo et al., 2018)

Desa Mojorejo merupakan desa yang telah melaksanakan program pertanian organik pada tahun 2022 dan program pertanian organik ini sudah masuk dalam RPJMDes Desa Mojorejo yang tertuang dalam kebijakan pembangunan di bidang pertanian. Tujuan dari pertanian organik di Desa Mojorejo yaitu : untuk kembali menuju pertanian alami, untuk mengurangi biaya produksi pertanian, untuk menjadikan wisata edukasi pertanian organik. Pertanian organik mendapat popularitas sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran bahwa mereka mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas makanan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Namun, pertanian organik juga menghadapi beberapa masalah, seperti produktivitas yang lebih rendah, risiko hama dan penyakit, dan kurangnya dukungan masyarakat dan kesadaran akan produk organik. Petani di Poktan Tani Makmur, Poktan Tani Murni, dan Poktan Tani Mulyo, bersama dengan pemerintah Desa Mojorejo, berusaha untuk mengubah sistem pengolahan pertanian mereka menjadi organik. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan adalah pemberian pupuk organik dan pelatihan dalam pembuatan pupuk organik cair dan padat, pupuk hayati yang dibuat menggunakan MOL (Mikro Organisme Lokal), dan pestisida alam. Penggunaan pupuk organik dalam budidaya padi telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan bagi petani.

Selain mendukung keberlangsungan ekosistem tanah, pertanian organik mengurangi biaya pengolahan lahan pertanian. Untuk mendapatkan akses ke bantuan yang dimaksudkan untuk membangun program pengembangan desa pertanian organik, kelompok tani harus telah menerapkan sistem pertanian organik, terlepas dari apakah mereka telah disertifikasi atau tidak. Pertanian organik di Desa Mojorejo sudah berjalan 40% dan tingkat keberhasilan dari pengembangan pertanian organik di Desa Mojorejo sudah 60%. Pemerintah desa Mojorejo mensupport anggaran berupa bimbingan teknik kepada anggota kelompok tani dan pelatihan. Kendala kendala yang dihadapi dalam mengembangkan pertanian organik adalah meyakinkan petani akan hasil pertanian organik yang dianggap belum maksimal.

Pada Selasa, 27 Juni 2023, Di hamparan sawah Kelompok Tani Tani Makmur di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Sekolah Lapang Tematik Gerakan Tani Pro-Organik (SL-Tematik Genta Organik) mengadakan Kegiatan Hari Ladang (FFD).

Acara tersebut dihadiri oleh bupati Ponorogo, Koordinator Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Dosen dari Polbangtan Malang, Kepala Bulog Cabang Ponorogo, dan Forkopimcam Jetis. Kegiatan dimulai dengan panen simbolis padi di hadapan petani, peserta SL, dan tamu undangan. FFD adalah metode pemberdayaan petani yang melibatkan Petani, peneliti, dan penyuluh berkumpul untuk berbagi informasi tentang teknologi pertanian dan mencari solusi untuk masalah pertanian. Salah satu pilar utama visi Kabupaten Ponorogo adalah Ponorogo Hebat, kata Bupati Sugiri Sancoko. Namun, Sugiri menyoroti bahwa kepemilikan lahan pertanian yang sempit (antara 0,5 dan 2 kotak) dan karena tingginya biaya produksi, terutama pupuk, petani tidak dapat menghasilkan keuntungan yang paling besar. Ia menyatakan bahwa jerami padi dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah sebagai pupuk organik, tetapi pemanfaatan limbah pertanian lainnya masih kurang efisien. Oleh karena itu, untuk memanfaatkannya, kreativitas dan inovasi diperlukan, serta kolaborasi dengan bank sebagai penyedia modal. Masun, Kepala Dipertahanan, menyatakan bahwa FFD adalah puncak dari serangkaian kegiatan SL-Tematik Genta Organik. Kegiatan ini melibatkan 10 kelompok tani di Kecamatan Jetis yang mengikuti sosialisasi, rebug tani, dan pelatihan. Di lahan demplot seluas 0,5 ha per kelompok tani, proyek ini mencakup produk pupuk organik, pengembangan MOL, dan agensi hayati. Biosaka juga berlaku. Dyah Sulistyowati, Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, mengatakan bahwa pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk mengembangkan pertanian organik yang berhasil. Penelitian berjudul "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pertanian Organik Di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" adalah inspirasi dari penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut sehingga didapatkan rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana suatu kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan pertanian organik di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
- b) Bagaimana tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan pertanian organik di Desa Mojorejo Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengemukakan tujuan yang akan dicapai berdasar pada permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tujuannya adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pertanian organik di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui tantangan atau hambatan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan Pertanian Organik di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo

### **D. Manfaat Penelitian**

Hadirnya penelitian ini dapat di harapkan akan memberi manfaat yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Teoritisnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan pengetahuan baru tentang perkembangan pertanian organik dan bagaimana teori dan pengalaman yang dipelajari selama studi dapat diterapkan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai acuan untuk penelitian yang serupa.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Sebagai tugas akhir mahasiswi untuk menyelesaikan kuliah di program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan untuk memperluas pengetahuan peneliti.

##### **b. Bagi Pemerintah yang ada di Desa Mojorejo**

Hadirnya sebuah penelitian ini dapat di harapkan sebagai sebagai acuan serta masukan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengembangan pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan.

##### **c. Bagi Masyarakat**

Memberikan solusi kepada masyarakat melalui program pertanian organik untuk mengetahui menjadikan pertanian di Desa Mojorejo menjadi lebih baik.

## **E. Penegasan Istilah**

### a. Kebijakan

Kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan atau target tertentu dengan berbagai cara dan dalam waktu tertentu (Richter et al., n.d.).

### b. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan kepala desa beserta perangkat desa.

### c. Pertanian Organik

Pertanian organik itu sendiri merupakan sebuah sistem yang dimana usaha dalam mempertahankan semua jenis bahan yang mengandung organik yang ada dalam tanah serta memiliki tujuan untuk memberi makanan pada tumbuhan.

## **F. Landasan Teori**

Kebijakan publik, dalam konteks ilmu administrasi, dapat diartikan sebagai keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aktivitas dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Menurut Amir Santoso, kebijakan publik terdiri dari berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan yang jelas, di mana dampak dari kebijakan tersebut bisa diprediksi. Kategori kebijakan publik mencakup semua langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi sasaran spesifik, serta efek yang bisa diperkirakan dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022).

Ketika kebijakan publik bertentangan dengan prinsip-prinsip masyarakat, pelaksanaannya akan menghadapi tantangan. Sebaliknya, kebijakan publik yang efektif harus dapat mengakomodasi prinsip dan kebiasaan yang berkembang. Kebijakan publik dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, dan pertahanan. Selain itu, berdasarkan hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat lokal, regional, atau nasional. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Sunarto, 2015).

Edward III lebih lanjut mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi adalah beberapa dari komponen tersebut. Keempat faktor ini memainkan peran penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, setiap

faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, menciptakan sebuah jaringan kompleks yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan (Capinera, 2021).

Menguji data dan menerapkan sistem yang dihasilkan dari proses seleksi disebut implementasi. Ini dapat berarti menguji antara konsep dan konseptual atau antara teks dan konteks. Fullan menyatakan bahwa implementasi adalah proses menerapkan konsep, program, atau kumpulan tindakan baru dengan tujuan untuk membuat orang lain menerima dan mengubah. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses menilai, mengevaluasi, dan mengukur keberhasilan suatu peraturan atau kebijakan untuk menentukan apakah program harus dievaluasi atau tidak (Yono, 2023).

#### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi ide atau gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis, melalui sistem umum seperti simbol, sinyal, atau perilaku. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik, kualitas komunikasi memegang peranan penting; komunikasi yang tidak efektif dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap implementasi kebijakan. Komunikasi yang komunikatif, konsisten, dan jelas sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan publik. Pelaksana harus memahami apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan berhasil. Selain itu, untuk mengurangi jarak antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada kelompok sasaran. Jika informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan tidak disampaikan dengan jelas, kelompok sasaran kemungkinan besar akan menentanginya. Untuk membantu negosiasi dan mencapai konsensus yang menguntungkan, kemampuan komunikasi harus ditingkatkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

#### 2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, efektivitas implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya, seperti sumber daya manusia dengan kompetensi yang sesuai atau dukungan finansial yang cukup, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya

merupakan elemen krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan; tanpa adanya sumber daya yang memadai, kebijakan hanya akan tetap menjadi dokumen di atas kertas tanpa adanya realisasi yang nyata (Delpiero Roring et al., 2021).

### 3. Disposisi

Menurut Edward III yang dikutip dalam Widodo (2010:104), disposisi mengacu pada kemauan, motivasi, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangannya, disposisi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III juga menyoroti beberapa faktor penting terkait disposisi, seperti pengangkatan birokrasi dan insentif, yang disebutkan dalam Agustinus (2006:159). Pengangkatan birokrasi berhubungan dengan penempatan individu yang tepat dalam posisi strategis, sementara insentif berfungsi untuk mendorong dan memotivasi pelaksana kebijakan agar berkomitmen pada pelaksanaan tugas mereka. Kedua faktor ini berperan penting dalam memastikan bahwa disposisi pelaku kebijakan dapat mendukung tercapainya hasil yang diinginkan (Zahara et al., 2021)(Zahara et al., 2021).

### 4. Struktur Birokrasi

Edward III, elemen keempat yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi terdiri dari dua komponen utama: (1) mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. Edward III menyatakan bahwa para pelaksana kebijakan sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan karena sistem birokrasi yang ada, meskipun mereka tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki sikap dan sumber daya yang diperlukan. SOP yang efektif harus memiliki struktur yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami untuk membantu para pelaksana kebijakan. Dalam penelitian terkait, ditemukan bahwa pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban (Perdes No.1/2016) tidak menetapkan organisasi pelaksana khusus. Sebaliknya, kebijakan tersebut dilaksanakan oleh unit organisasi yang sudah ada dalam struktur pemerintahan desa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu, pemerintah desa juga tidak menyusun petunjuk pelaksanaan atau SOP khusus untuk kebijakan tersebut; pelaksanaan dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tanpa struktur organisasi pelaksana dan SOP yang jelas,

implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa tersebut tetap dapat berjalan dengan baik dan efektif (YURENSI LAARY F.M.G. TULUSAN SALMIN DENGOL, 2022).

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi mengenai bagaimana kebijakan disampaikan kepada publik dan respons dari pihak yang terlibat sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan harus diinformasikan secara akurat kepada pihak pelaksana serta kelompok sasarannya sebelum dilaksanakan. Pemahaman yang baik dari pihak pelaksana tentang detail pelaksanaan kebijakan adalah krusial untuk kesuksesan implementasi. Respons yang positif dari pihak pelaksana juga merupakan faktor penentu penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kehadiran yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi sangat diperlukan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan kebijakan dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan (Alkalah, 2016).

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan elemen krusial dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Meskipun kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, kekurangan sumber daya di pihak pelaksana akan menghambat keberhasilan implementasinya. Tanpa sumber daya yang memadai, upaya untuk menjalankan kebijakan akan terbatas dan hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup adalah langkah penting dalam proses implementasi kebijakan.

Sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan meliputi berbagai aspek. Pertama, staf yang memiliki jumlah dan kompetensi yang memadai sangat diperlukan. Kedua, pelaksana harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan kebijakan. Selain itu, informasi yang relevan dan memadai sangat penting untuk mendukung keputusan dan tindakan yang tepat. Terakhir, ketersediaan fasilitas yang diperlukan, seperti peralatan dan infrastruktur, juga merupakan faktor pendukung yang tidak boleh diabaikan. Semua elemen ini

harus terpenuhi agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan (Ruhana & Yuliana, 2013).

### 3. Disposisi

Sikap dan disposisi pelaksana kebijakan merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, pelaksana tidak hanya perlu memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk melaksanakannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh perspektif implementor. Jika mereka setuju dengan isi kebijakan, mereka akan dengan antusias melaksanakannya, tetapi jika pandangan mereka bertentangan dengan pembuat kebijakan, banyak masalah dapat muncul dalam proses implementasi. Disposisi ini mencakup karakteristik seperti kejujuran, komitmen tinggi, dan sifat demokratis. Implementor dengan disposisi yang baik akan lebih mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Di masa sekarang, ketika tantangan pendidikan semakin kompleks, komitmen dan kemauan dari setiap pelaksana kebijakan menjadi sangat penting. Tujuan undang-undang akan sulit tercapai jika pembuat kebijakan dan pelaksana tidak bekerja sama dan saling memahami. Oleh karena itu, kepedulian dan kerjasama antar pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan kebijakan (Haryaningsih et al., 2022).

### 4. Struktur Birokrasi

Edwards III (1980:125) menyatakan bahwa meskipun pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki keinginan untuk melakukannya, dan memiliki sumber daya yang cukup, mereka masih bisa terhambat oleh struktur organisasi tempat mereka bekerja. Menurutnya, ada dua karakteristik dalam struktur organisasi yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi. Pertama, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah prosedur rutin yang memungkinkan pelaksana menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau, setidaknya, memenuhi kebutuhan minimum warga. Kedua, melakukan fragmentasi, yaitu menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas atau program ke beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan menerapkan SOP yang fleksibel dan fragmentasi yang tepat, struktur organisasi dapat berfungsi lebih efisien, sehingga mendukung

pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif (Rahmani, 2021).

## H. Metodologi Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang ada, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lebih baik tentang subjek dan kondisi saat ini. Peneliti berfungsi sebagai alat penting untuk memperoleh data yang relevan dengan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisa yang bersifat analisa perspektif subjek agar proses penelitian sesuai dengan lapangan. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memperoleh suatu penggambaran dan juga pemahaman yang lebih jelas serta mendalam tentang suatu permasalahan.

Dengan digunakannya metode deskriptif kualitatif, peneliti berharap untuk dapat menjelaskan menggambarkan apa saja yang ada pada lapangan dengan baik sehingga dapat memperoleh data yang sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian tersebut, peneliti menjabarkan bagaimana peran pemerintah desa dalam mengembangkan program pertanian organik menuju pertanian berkelanjutan di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.

### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian di sebuah wilayah di Desa Mojorejo, yang terletak di Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan karena Desa Mojorejo memiliki program pertanian organik.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling purposive. Teknik purposive sampling menempatkan informan pada elemen atau individu tertentu yang paling mungkin memahami data yang diperlukan. Berikut ini informan yang telah ditentukan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Sekretaris Desa Mojorejo
2. Ketua Poktan Tani Makmur

3. Ketua Poktan Tani Murni
  4. Ketua Poktan Tanu Mulyo
- d. Teknik Pengumpulan Data

Jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, peneliti harus berhati-hati dalam memilih metode pengumpulan data yang tepat. Penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu dimulai dari tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi di Desa Mojorejo dalam penelitian ini. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan melihat dan mencatat berbagai fenomena yang akan diamati.

2. Wawancara

Wawancara baik secara teratur maupun secara spontan. Dalam wawancara yang dilakukan secara teratur, peneliti memiliki pemahaman yang jelas mengenai informasi apa saja yang akan mereka peroleh melalui persiapan sebuah instrumen seperti pertanyaan. Dalam wawancara yang dilakukan secara spontan, peneliti tidak menggunakan aturan atau acuan dalam wawancara yang sudah disusun sedemikian rupa dan lengkap untuk mendapatkan seluruh datanya, hanya secara garis besar masalah yang di pergunkan. Wawancara dapat dilakukan baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui media perantara daring untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi.

3. Dokumentasi

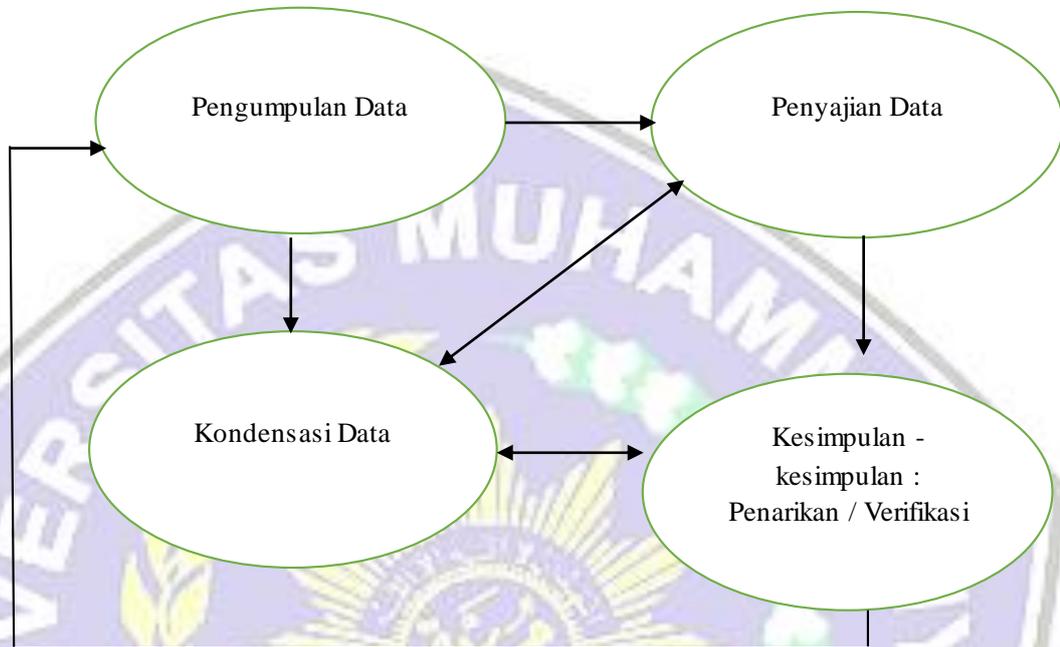
Pengumpulan data atau dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian disebut dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian dapat berupa foto, video, dokumen atau arsip pemerintah, cerita masyarakat, dan jenis lainnya yang berguna sebagai pelengkapan dari observasi dan wawancara.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengubah data sistematis dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk membantu peneliti memahami kasus atau masalah yang akan diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap: “pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan” (Miles dan Huberman, 1992). “Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan,

pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari laporan tertulis di lapangan” (Agusta Ivanovich, n.d.).

**Gambar 1.1**  
**Analisis Data**



### 1. Pengumpulan Data

Alat yang digunakan peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti agar kegiatan penelitian menjadi sistematis dan mudah.

### 2. Kondensasi Data

Tahap pertama, kondensasi data adalah proses pemilihan yang berfokus pada penggantian dan penyederhanaan informasi dalam catatan lapangan, seperti data dokumentasi dan wawancara. Data tersebut kemudian dimodifikasi dengan seleksi dan peringkasan. Dipilih atau diartikulasikan, peneliti mencari tema dan pola penting untuk membuang tema dan pola yang tidak penting.

### 3. Penyajian Data

Catatan lapangan, teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah beberapa contoh penyajian data kualitatif. Ini terjadi ketika sekumpulan data disusun untuk memungkinkan tindakan dan kesimpulan dibuat. Dengan menggabungkan informasi yang mudah dipahami, bentuk-bentuk ini membuatnya mudah untuk melihat peristiwa, mengevaluasi kesimpulan, atau melakukan analisis kembali.

### 4. Penyajian Kesimpulan

Peneliti terus berusaha sampai pada kesimpulan selama mereka bekerja di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti objek, menulis keteraturan pola (dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi potensial, alur sebab akibat, dan proposisi. Terlepas dari seberapa bebas, terbuka, dan skeptis penelitian ini dilakukan, hasilnya jelas. Mula-mula tidak jelas, tetapi seiring waktu menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Beberapa hal dilakukan selama penelitian untuk memvalidasi temuan: (1) pertimbangan ulang selama penulisan, (2) pertimbangan ulang catatan lapangan, (3) diskusi dan tinjauan kembali dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, dan (4) upaya yang luas untuk menyalin temuan ke dalam berbagai kumpulan data.